

**LAPORAN PENELITIAN
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2014**



**IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**

Oleh :

Hj. Irawati Abdul, SE., M.Si (Ketua)	NIP. 19740209 200501 2 001
Melizubaida Mahmud., S.Pd., M.Si (Anggota)	NIP. 19780817 200812 2 002
Fitri Hadi Yulia Akib., SE., ME (Anggota)	NIP. 19820725 200801 2 010

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOVEMBER 2014**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN DANA PNBPFEB

Judul Kegiatan : Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

KETUA PENELITIAN

A. Nama Lengkap : Irawati Abdul, SE, M.Si
B. NIDN : 0009027402
C. Jabatan Fungsional : Lektor
D. Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi
E. Nomor HP : 085240105510
F. Email : irawatiabdul@yahoo.com

Lama Penelitian Keseluruhan : 3 bulan
Penelitian Tahun Ke : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 5.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 5.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



(Dr. Mamzah Yunus, M.Pd)
NIP/NIK. 196002231986031004



Gorontalo, 20 November 2014
Ketua Penelitian



(Irawati Abdul, SE, M.Si)
NIP/NIK. 197402092005012001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si)
NIP/NIK. 196912091993032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas izinNya Laporan Penelitian Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dapat diselesaikan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi kelembagaan UMKM di Kecamatan Kota Tengah, karena kelembagaan UMKM secara teknis bertugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan dan bimbingan kepada UMKM yang meliputi pembinaan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan, pengembangan kemitraan dan pengembangan jaringan usaha. Diharapkan dengan kelembagaan ini dapat meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Penelitian Ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan anggaran untuk pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemerintah Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, BPS Gorontalo, Para Responden serta pihak terkait yang telah memberikan data informasi dalam penyusunan laporan ini.

Semoga melalui laporan penelitian ini dapat dapat memberi manfaat sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan berbagai kebijakan yang ditempuh serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang UMKM

Gorontalo, November 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
IDENTITAS PENELITIAN.....	v
SUBSTANSI PENELITIAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Rumusan Masalah	2
1.4. Tujuan Penelitian	2
1.5. Manfaat Penelitian	2
1.5.1 Manfaat Teoritis	2
1.5.2 Manfaat Praktis.....	3
BAB II KAJIAN TEORI.....	4
2.1 Pengertian Usaha Mikro	4
2.1.1 Kriteria Usaha Mikro	4
2.1.2 Contoh Usaha Mikro.....	4
2.2 Pengertian Usaha Kecil.....	5
2.2.1 Ciri-ciri Usaha Kecil	7
2.2.2 Contoh Usaha Kecil	8
2.3 Pengertian Usaha Menengah.....	8
2.3.1 Kriteria Usaha Menengah	8
2.3.2 Contoh Usaha Menengah.....	9
2.3.4 Kriteria Jenis Usaha berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	9
2.4 Pengertian Implementasi.....	10
2.5 Pengertian Kelembagaan	11
2.6 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	13
3.1 Latar Penelitian.....	13
3.2 Jenis Penelitian	13
3.3 Lokasi Penelitian	13

3.4 Fokus Penelitian	13
3.5 Informan Penelitian	14
3.6 Jenis Dan Sumber Data.....	14
3.7 Teknik Pengumpulan Data	15
3.8 Teknik Analisis Data.....	15
BAB IV PEMBAHASAN.....	18
4.1 Faktor Geografis Wilayah	18
4.2 Faktor Human Developmen Indeks	18
4.3 Faktor Kemiskinan	19
4.4 Faktor Kependudukan	20
4.5 Faktor Penduduk Miskin (indeks Kedalaman Kemiskinan).....	20
4.6 Faktor Inflasi	22
4.7 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah.....	24
4.8 Pemetaan Potensi Dan Implementasi UMKM Di Kec. Kota Tengah	25
4.8.1 Pemetaan Potensi dan Implementasi pengembangan UMKM di Kelurahan Paguyaman.....	26
4.8.2 Pemetaan Potensi dan Implementasi pengembangan UMKM di Kelurahan Liluwo	28
4.8.3 Pemetaan Potensi dan Implementasi pengembangan UMKM di Kelurahan Pulubala	30
4.8.4 Pemetaan Potensi dan Implementasi pengembangan UMKM di Kelurahan Wumiyalo	32
4.8.5 Pemetaan Potensi dan Implementasi pengembangan UMKM di Kelurahan Dulalowo Timur.....	35
4.8.6 Pemetaan Potensi dan Implementasi pengembangan UMKM di Kelurahan Dulalowo	35
4.8.7 Pemetaan Potensi dan Implementasi pengembangan UMKM di Kecamatan Kota Tengah	37
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Rekomendasi	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja.....	10
2.	Kriteria UMKM menurut Undang-Undang.....	12
3.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Gorontalo.....	19
4.	Presentasi Penduduk Miskin Kota Gorontalo selang tahun 2009- 2012	19
5.	Indikator Keadaan Penduduk Kota Gorontalo tahun 2006-2011	20
6.	Tingkat Pengangguran dan Indikator Kemiskinan Kota Gorontalo	21
7.	Inflasi Bulanan Kota Gorontalo tahun 2010-2014	23
8.	Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Gorontalo Tahun 2009-2011	25
9.	Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Paguyaman	27
10.	Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Liluwo.....	29
11.	Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Pulubala	31
12.	Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Wumiyalo	33
13.	Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Dulalowo Timur	35
14.	Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Dulalowo	37
15.	Implementasi Kapasitas Aset Usaha Kecil Menengah dan Mikro di Kecamatan Kota Tengah 2014.....	39

I. IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Usulan : Implementasi kelembagaan UMKM Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

2. Ketua Peneliti

- a) Nama Lengkap : Hj. Irawati Abdul, SE.,M.Si
- b) Bidang Keahlian : Ilmu Ekonomi
- c) Jabatan Struktural : Dosen
- d) Jabatan Fungsional : Lektor
- e) Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
- f) Alamat : Perum Kaputih Indah Blok F Nomor. 9
Kecamatan Tengah Kota Gorontalo
- g) Telepon/Faks : 085240105510
- h) E-mail : irawatiabdul_ung@yahoo.com

3. Tim Peneliti

No	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi waktu (jam/minggu)
1.	Melizubaida Mahmud, S.Pd., M.Si	Administrasi Publik	FEB UNG	3.0
2.	Fitri Hadi Yulia Akib, SE., ME	Ilmu Ekonomi	FEB UNG	3.0

4. Objek Penelitian : Implementasi Kelembagaan UMKM Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

5. Masa Pelaksanaan : 3 Bulan
Mulai : Oktober 2014
Berakhir : Desember 2014

6. Anggaran yang diusulkan: Rp. 5.000.000.- (**Lima Juta Rupiah**)

7. Lokasi penelitian : Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

8. Hasil yang ditargetkan : Implementasi Kelembagaan UMKM di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

II. SUBSTANSI PENELITIAN

ABSTRAK

Sesuai data Badan Statistik Provinsi Gorontalo, pada tahun 2009 UMKM di Kota Gorontalo berjumlah 11.031 unit atau 19 % dari total UMKM di Provinsi Gorontalo. Bila dihitung berdasarkan jenis usaha maka jenis usaha mikro berjumlah 81.11%, usaha kecil 17,60% dan usaha menengah 1,29%. Berdasarkan data UMKM tersebut dapat pula di lihat menurut sektor usaha di Kota Gorontalo yaitu usaha Pertambangan dan Penggalian sebanyak 76 unit, usaha industri pengolahan sebanyak 1.055 unit, dan usaha listrik serta air masing-masing 3 unit. Selanjutnya usaha perdagangan sebanyak 7.309 unit, usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebanyak 321 unit, usaha transportasi dan penggudangan sebanyak 738 unit dan usaha perantara keuangan sebanyak 38 unit. Selain itu terdapat pula usaha persewaan dan usaha jasa perusahaan sebanyak 3 unit serta usaha jasa pendidikan sebanyak 14 unit. Bertitik tolak dari data BPS terlihat bahwa jenis Usaha yang ada di kota Gorontalo di dominasi oleh UMKM. Oleh karena itu pemerintah daerah sejatinya harus mendorong secara maksimal dalam memberdayakan keberadaan UMKM agar pergerakan ekonomi di daerah bertumbuh yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun berdasarkan observasi awal terlihat bahwa keadaan tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang di harapkan. Seperti dari aspek kelembagaan yang belum tertata dengan baik. Hal ini merupakan tantangan kepada semua pihak terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan keberadaan kelembagaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong daya saing suatu usaha. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *Bagaimana Implementasi Kelembagaan UMKM di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?*

Tehnik analisis yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Tehnik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis . untuk menajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah di pahami adalah menggunakan *interactive model analysis*.

Kata kunci : Implementasi, Kelembagaan, Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 kemudian masuk masa pemulihan (*Recovery*) ekonomi melalui kebijakan reformasi, keberadaan usaha mikro kecil menengah selalu dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder lainnya. Pengembangan usaha membuat peluang usaha kecil semakin terbuka karena tingkat resikonya kecil.

Sesuai data Badan Statistik Provinsi Gorontalo, pada tahun 2009 UMKM di Kota Gorontalo berjumlah 11.031 unit atau 19 % dari total UMKM di Provinsi Gorontalo. Bila dihitung berdasarkan jenis usaha maka jenis usaha mikro berjumlah 81.11%, usaha kecil 17,60% dan usaha menengah 1,29%. Berdasarkan data UMKM tersebut dapat pula dilihat menurut sektor usaha di Kota Gorontalo yaitu usaha Pertambangan dan Penggalian sebanyak 76 unit, usaha industri pengolahan sebanyak 1.055 unit, dan usaha listrik serta air masing-masing 3 unit. Selanjutnya usaha perdagangan sebanyak 7.309 unit, usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebanyak 321 unit, usaha transportasi dan penggudangan sebanyak 738 unit dan usaha perantara keuangan sebanyak 38 unit. Selain itu terdapat pula usaha persewaan dan usaha jasa perusahaan sebanyak 3 unit serta usaha jasa pendidikan sebanyak 14 unit.

Bertitik tolak dari data BPS terlihat bahwa jenis usaha yang ada di kota Gorontalo didominasi oleh UMKM. Oleh karena itu pemerintah daerah sejatinya harus mendorong secara maksimal dalam memberdayakan keberadaan UMKM agar pergerakan ekonomi di daerah bertumbuh yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun berdasarkan observasi awal terlihat bahwa keadaan tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan, seperti dari aspek kelembagaan yang belum tertata dengan baik. Hal ini merupakan tantangan kepada semua pihak terutama dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan keberadaan kelembagaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong daya saing suatu usaha.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan kajian penelitian terkait dengan UMKM dengan formulasi judul” **Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi bahwa salah satu masalah yang mengemuka pada UMKM di kecamatan Kota Tengah kota Gorontalo adalah belum tertatanya kelembagaan sehingga kontribusi UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Implementasi kapasitas kelompok Usaha Kecil Menengah dan kapasitas aset di masing-masing kelurahan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?*”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan *Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo*”.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian teoritis pada dunia pendidikan terutama mengenai ilmu ekonomi, yang dapat digunakan mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan bidang Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan

2. Untuk memperluas dan menambah wawasan bagi peneliti tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang UMKM itu sendiri.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

BAB II

TTINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro yaitu usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta).

2.1.1 Kriteria Usaha Mikro

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2.1.2 Contoh Usaha Mikro

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
2. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan

5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

- a) Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang
- b) Tidak sensitive terhadap suku bunga
- c) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter
- d) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

2.2 Pengertian Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil yaitu Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomimasyarakat. Secara otentik, pengertian usaha kecil diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Yaitu: "kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pengertian disini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum didaftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Perbedaan

usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

- a) Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
- b) Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
- c) Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.
- d) Bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota ketika menghadapi kendala usaha. Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Perorangan

Merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. Maju mundurnya usahanya tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya.

- b) Usaha Persekutuan

Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan pada kekatnya penggolongan usaha kecil, yaitu Industri kecil, seperti industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya

Perusahaan berskala kecil seperti toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya. Usaha informal, seperti perdagangan kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- c) Milik Warga Negara Indonesia
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "*Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.*"

2.2.1 Ciri-ciri Usaha Kecil

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah

3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan membuat neraca usaha
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

2.2.2 Contoh Usaha Kecil

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan
5. Koperasi berskala kecil.

2.3 Pengertian Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah yaitu Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

2.3.1 Kriteria usaha menengah

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

2.3.3 Contoh Usaha Menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

1. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah
2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor
3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

2.3.4 Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	>4 orang	5-19 orang	20-99 orang	≥ 100 orang

2.4 Pengertian Implementasi

Studi Implementasi secara sungguh-sungguh dianggap muncul pertamakali pada tahun 1970-an saat Jeffrey Pressman & Aaron Wildavsky (1973) menerbitkan bukunya yang sangat berpengaruh : *Implementation*, dan Erwin Hargrove (1975) dengan bukunya *The Missing link : The Study of Implementation of Social Policy* yang mempertanyakan “*missing link*” antara formulasi kebijakan dan evaluasi dampak kebijakan dalam studi Kebijakan publik. Sejak saat itu studi tentang Implementasi mulai marak, terutama karena fakta menunjukkan berbagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial terbukti tidak efektif.

Hargrove menyatakan menyatakan selama ini studi tentang *Public Policy* hanya menitik beratkan pada studi tentang proses pembuatan kebijakan dan studi-studi tentang evaluasi, tapi mengabaikan permasalahan-permasalahan pengimplementasian. Proses administrasi antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan dianggap sebagai kotak hitam (black box) yang tidak berhubungan dengan kebijakan (terutama karena budaya administrasi dinegara Inggris yang bersifat relatif tertutup) Sampai akhir tahun 1960-an anggapan umum adalah bahwa mandat politik dalam policy sudah sangat jelas dan orang-orang administrasi akan melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh “bos” mereka.

Dua perspektif awal dalam studi implementasi didasarkan pada pertanyaan sejauhmana implementasi terpisah dari formulasi kebijakan, yakni apakah suatu kebijakan dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh Daerah (bersifat *Top-Down*) atau kebijakan tersebut dibuat dengan melibatkan aspirasi dari bawah

termasuk yang akan menjadi para pelaksananya (*Bottom-Up*). Padahal persoalan ini hanya merupakan bagian dari permasalahan yang lebih luas, yakni bagaimana mengidentifikasi gambaran-gambaran dari suatu proses yang sangat kompleks, dari berbagai ruang dan waktu, serta beragam aktor yang terlibat didalamnya.

Para penulis studi implementasi pun memiliki keragaman tanggapan atas kekompleksan variabel yang terlibat didalamnya. Ada penulis yang cukup berani menyederhanakannya dengan mengurangi variabel-variabel tersebut, namun ada pula yang mencoba mengembangkan model studi implementasi dengan memperhitungkan seluruh variabel yang teridentifikasi dalam studi mereka. Oleh karenanya dalam Studi Implementasi pretensi untuk mengembangkan suatu teori implementasi yang bersifat umum (*Grand Theory*) yang dapat berlaku untuk semua kasus, di semua tempat dan waktu, hampir mustahil dicapai, karena yang dikembangkan tak lebih hanya akan menjadi teori “tindakan” atau teori “melaksanakan” bukan teori Implementasi Kebijakan.

2.5 Pengertian Kelembagaan

Kelembagaan/Institusi pada dasarnya merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal yang mengatur perilaku (*Behavioural rules*) dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi atau mengatur hubungan-hubungan interaksi antar individu-individu. Masyarakat membuat pengaturan perilaku kepada individual, bertujuan agar individual tidak akan mengancam/merusak keberlanjutan kehidupan masyarakat keseluruhan sampai akhir zaman. Contoh dari institusi/kelembagaan adalah kelembagaan pertukaran dari barang dan jasa melalui ekonomi pasar (*Market Economy*) atau kelembagaan non-pasar yang banyak terdapat di wilayah perdesaan seperti bagi hasil, atau sewa atau hak pakai. Pembagian hasil diatur menurut kesepakatan bersama. (Affendi Anwar 2007). Untuk membedakan dari aliran “Lama” dari kubu Institutionalists (Veblen, Commons) yang anti cara analitik matematikal dari kubu neo-klasikal, EIB bekerja dalam kerangka ekonomi neo-klasikal, tetapi terjadi pengenduran (*relaxing*) dari beberapa asumsinya dan memasukkan institusi sebagai suatu kendala tambahan.

2.6 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

- a) Usaha Mikro yaitu kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil yaitu kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per-orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah yaitu kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai.
- d) Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yaitu kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan Omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2 Kriteria UMKM menurut Undang-Undang

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni mendeskripsikan Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian teoritis pada dunia pendidikan terutama mengenai ilmu ekonomi, yang dapat digunakan mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan bidang Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan
- b. Untuk memperluas dan menambah wawasan bagi peneliti tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang UMKM itu sendiri.

3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Karena peneliti menganggap bahwa lokasi tersebut sangat cocok dengan ruang lingkup penelitian peneliti lakukan. Penetapan tempat penelitian pada lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan karena objek tersebut dapat memberikan keterangan yang lengkap tentang masalah yang diteliti dan dekat tempat tinggal peneliti. Sedangkan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu selama 3 (tiga) bulan yakni dari bulan Oktober-Desember 2014.

4.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan implementasi kelembagaan UMKM di Kota Tengah Kota Gorontalo.

4.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Alasan peneliti dalam mengambil lokasi ini karena akses transportasi lebih terjangkau, terbatasnya waktu dalam pengambilan data, dan terbatasnya tenaga.

4.4 Fokus Penelitian

Menurut Bogdan dalam Nasution (2006:31) dalam menentukan fokus penelitian kualitatif pada awalnya masalah yang akan diteliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah penulis berada dalam lapangan. Fokus ini masih mungkin mengalami perubahan selama berlangsungnya penelitian. Dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dan tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

4.5 Informan Penelitian

Menurut Maleong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus banyak mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang di amati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara *Purposive* sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik *snow ball sampling*. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh jenis Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang masih aktif.

4.6 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan dan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder yakni:

- 1) Data Primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.
- 2) Data Sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Sangaji, 2010:44).

4.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Observasi*: mengemukakan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan memaksimalkan observasi melalui pengamatan dan ingatan serta pemahaman terhadap obyek yang akan diteliti. Untuk mengurangi kelemahan dalam pengamatan, maka observasi ini dilakukan dengan cara : a) menggunakan kesempatan lebih banyak untuk melihat data-data, kemudian mengambil data-data yang sejenis lebih banyak b) meningkatkan daya penyesuaian diri peneliti dengan informan, memahami dan mengetahui, mengurangi prasangka namun memiliki target yang akan dicapai.

Sehubungan dengan hal itu, untuk mempermudah ingatan peneliti, maka akan digunakan beberapa alat bantu : a) catatan-catatan kecil dan panduan wawancara, b) menggunakan alat bantu rekam berupa kamera, handycam, dan tape recorder.

2. *Interview/ wawancara*. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Maleong 2006:186). Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari catatan-catatan publik tentang hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa buku, kertas, dan tabel.

4.8 Teknik Analisis Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Menurut Bogdan dalam Maleong (2006:284) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikolola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dalam sugiono (2009;91) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis*. Dalam model analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1) Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai implementasi kelembagaan UMKM di Kota Tengah Kota Gorontalo, kemudian memilah-milahnya kedalam kategori tertentu.

2) Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan penyampaian informasi berdasarkan data

yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral implementasi kelembagaan UMKM di Kota Tengah Kota Gorontalo dapat diketahui dengan mudah.

3) Tahap verifikasi data /penarikan kesimpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Faktor Geografis Wilayah

Kota Gorontalo sebagai salah satu kotasekaligus sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, letaknya diapit oleh dua kabupaten besar, yaitu Gorontalo disebelah barat dan Bone Bolango disebelah timur. Letak astronomisnya antara $00^{\circ} 28' 17''$ - $00^{\circ} 35' 56''$ Lintang Utara dan antara $122^{\circ} 59' 44''$ - $123^{\circ} 05' 59''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Gorontalo sebesar 0,65 persen dari total luas daratan Provinsi Gorontalo. Adapun suhu udara di Gorontalo tahun 2013 berkisar antara $22,8^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $33,5^{\circ}\text{C}$. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembaban udara cukup bervariasi antara 56,2 persen sampai dengan 93,7 persen. Kelembapan udara terendah terjadi pada siang hari, sedangkan kelembapan udara tertinggi terjadi dipagi hari.

5.2 Faktor Human Development Indeks

Indikator kemajuan daerah pada umumnya diukur pada aspek pembangunan manusia. Kota Gorontalo adalah daerah yang telah terbentuk sejak pemerintahannya sejak bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengembangan daerah ini telah dipengaruhi waktu atau periode pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu indeks pembangunan manusia nampak mengalami kemajuan, dimana dilihat pada Tabel dibawah ini nampak Tahun 2009 sebesar 72,44 dan pada Tahun 2010 dan 2011 terjadi kenaikan yaitu 73,67 dan pada Tahun 2012 terus naik yaitu 74,17.

Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia Kota Gorontalo

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
(1)	(2)
2009	72,44
2010	73,67
2011	73,67
2012	74,17

Sumber: BPS Kota Gorontalo 2013

5.3 Faktor Kemiskinan

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu aspek kemiskinan. Trend kemiskinan di kota Gorontalo terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada Tabel dibawah yaitu sejak tahun 2009 yaitu sebesar 5,29 persen naik menjadi 5,49 persen pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2011 terus merangka naik menjadi 5,97 persen, namun pada tahun 2012 laju peningkatan kemiskinan masyarakat di kota Gorontalo sedikit mengalami penurunan yaitu 5,61. Meskipun hal ini sedikit mengalami penurunan namun bila disandingkan dengan periode sebelumnya nampak masih tinggi.

**Tabel 4 Persentase Penduduk Miskin Kota Gorontalo
selang Tahun 2009-2012**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)
2009	5,29
2010	5,49
2011	5,97
2012	5,61

Sumber: BPS Kota Gorontalo 2013

5.4 Faktor Kependudukan

Pembangunan ekonomi suatu wilayah dominan diarahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan penduduk berdomisili di daerah tersebut. Kota Gorontalo berpenduduk 109.682 sejak tahun 2006. Kurang waktu dua tahun kemudian jumlah penduduknya meningkat cukup signifikan yaitu 165.175 atau sekitar 28% dengan tingkat kepadatan sekitar 2.549 (jiwa/Km). Selanjutnya jumlah penduduk di Kota Gorontalo terus meningkat meskipun tidak sebesar pada tahun sebelumnya yaitu 170.455 atau naik sekitar 3% dengan tingkat kepadatan 2.630 (jiwa/Km).

Demikian pula pada tahun 2010 jumlah penduduk telah mencapai 180.127 atau naik sekitar 6% dari jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sehingga berdampak pula pada tingkat kepadatan yaitu 2.719 (jiwa/Km). Pada tahun 2011 penduduk tetap mengalami peningkatan yaitu 184.062 atau naik sekitar 2% dengan tingkat kepadatan sekitar 2.791 (jiwa/Km).

Tabel 5 Indikator Keadaan Penduduk Kota Gorontalo tahun 2006-2011

Tahun	2011	2010	2009	2008	2006
Jumlah Pria (jiwa)	90.335	88.283	85.225	81.344	54.753
Jumlah Wanita (jiwa)	93.727	91.844	85.230	83.831	54.929
Total (jiwa)	184.062	180.127	170.455	165.175	109.682
Pertumbuhan Penduduk (%)	2	6	3	-	-
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	2.791	2.719	2.630	2.549	-

Sumber: Biro Pusat Statistik Kota Gorontalo 2012

5.5 Faktor Penduduk Miskin (Indeks Kedalaman Kemiskinan)

Interpretasi lebih detil terhadap data penduduk miskin telah menjadi hal penting pada setiap penyusunan kebijakan dan program pemerintah khusus pada penanggulangan kemiskinan, artinya indikator kemiskinan menjadi penentu pada

setiap program dengan mengedepankan pelibatan unsur terkait. Sehingga akan mempermudah pelaksanaan dan evaluasi program pada aspek ini.

Tabel 6 Tingkat Pengangguran dan Indikator Kemiskinan Kota Gorontalo

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	8,88	5,29	0,67	0,16
2010	7,92	5,49	0,87	0,20
2011	5,88	5,97	0,98	0,26
2012	4,53	5,61	0,56	0,08
2013	7,37	5,99	0,87	0,18

Sumber: BPS Kota Gorontalo 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dikota Gorontalo tahun 2009 mencapai 8,88%, tingkat atau persentase penduduk miskin pada tahun yang sama mencapai 5,29% dengan tingkat kedalaman kemiskinan mencapai 0,67%, tingkat keparahan kemiskinan mencapai 0,16%. Hal ini wajar terjadi karena kota Gorontalo menjadi salah satu daerah tujuan penduduk dari desa berpindah kekota (Urbanisasi) karena diwilayah ini aktivitas perekonomian masyarakat dan adanya kegiatan sektor informal yang begitu dinamis menjadi pemicu kedatangan penduduk dari desa meskipun mereka tidak memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang cukup.

Persentase tingkat pengangguran terbuka terus menurun, dimana tahun 2010 menjadi 7,92%, namun berbalik arah dengan persentasi penduduk miskin pada tahun yang sama meningkat yaitu 5,49%, demikian pula indeks kedalam kemiskinan meningkat yaitu 0,87% serta indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,20%. Tingkat pengangguran dikota Gorontalo terus menurun tahun 2011 yaitu 5,88%, akan tetapi persentase kemiskinan terus meningkat mencapai 5,97%, dan indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,98% dengan indeks keparahan

kemiskinan mencapai 0,26%. Namun pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka menurun yaitu 4,53%, demikian pula tingkat kemiskinan menurun juga yaitu 5,61% dengan indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,56% sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun juga yaitu 0,08%.

Namun tingkat pengangguran terbuka dikota Gorontalo merangkak naik lagi mencapai 7,37% hampir menyamai tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010. Sehingga memicu tingkat pengangguran pada tahun yang sama mencapai 5,99% dengan indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,87%, demikian pula indeks keparahan kemiskinan di Kota Gorontalo mencapai mencapai 0,18%. Peningkatan pengangguran ini seiring dengan kondisi perekonomian makro baik ditingkat regional maupun nasional yang mengalami kelesuan dimana salah satu indikator yang dapat disimak yaitu terus melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing.

5.6 Faktor Inflasi

Indikator ekonomi yang lazim digunakan disuatu wilayah yaitu untuk mengukur perkembangan ekonomi yaitu faktor inflasi. Laju inflasi pada bulan Januari 2010 mencapai 0,38, kemudian pada bulan yang sama tahun 2011 turun menjadi 0,10, namun pada bulan yang sama tahun 2012 cukup mengalami kenaikan yaitu 1,65 dan tahun 2013 kembali turun yaitu 0,64. Demikian pula pada tahun 2014 di bulan yang sama turun lagi mencapai 0,36. Jika inflasi ditinjau dari periodisasi laporan dengan sistem kuartal maka bulan April tahun 2010 inflasi di kota Gorontalo mines -0,87, namun pada yang sama tahun 2011 kembali naik ke angka 0,50 dan terus naik mencapai 1,33 dibulan yang sama tahun 2012, namun dibulan April 2013 turun lagi menjadi -0,16 dan pada bulan yang sama 2014 kembali terjadi inflasi pada angka 0,31.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2010 inflasi dikota Gorontalo yaitu 3,73, akan tetapi inflasi pada bulan yang sama tahun 2011 mengalami penurunan yaitu 0,85, namun naik lagi pada bulan yang sama tahun 2012 yaitu 1,54, selanjutnya pada bulan yang sama tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu 1,89, dan pada bulan yang sama tahun 2014 belum ada data tentang laju inflasi di Kota Gorontalo.

Tabel 7 Inflasi Bulanan Kota Gorontalo tahun 2010-2014

Bulan	Inflasi Bulanan				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	0,38	0,10	1,65	0,64	0,36
Februari	1,68	-0,07	0,70	-0,06	-0,98
Maret	-0,47	-0,01	-0,57	1,07	0,31
April	-0,87	0,50	1,33	-0,16	0,89
Mei	0,43	0,92	0,59	-0,42	-0,34
Juni	0,20	0,60	0,32	0,11	0,45
Juli	1,45	1,26	0,96	2,77	0,77
Agustus	3,75	0,85	1,54	1,89	N/A
September	0,36	-0,27	-1,18	-3,43	N/A
Oktober	-1,14	0,55	0,11	0,53	N/A
November	0,93	-0,60	0,41	1,35	N/A
Desember	0,59	0,66	0,54	1,54	N/A

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2014

Pada Bulan Desember 2010 laju inflasi di Kota Gorontalo mencapai 0,59 dan pada bulan yang sama tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan yaitu 0,66, akan tetapi pada bulan yang sama tahun 2012 mengalami penurunan yaitu 0,54, sedangkan pada bulan Desember 2013 kembali naik menjadi 1,54 dan pada bulan yang sama tahun 2014 inflasi di Kota Gorontalo belum dapat dianalisis hasilnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat dari sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau dapat juga dikatakan pendapatan domestik regional bruto daerah. Para ahli ekonomi meyakini bahwa pendekatan model ini masih cukup relevan dengan tujuan mengukur kapasitas pendapatan asli daerah dari aspek *incemental capital out put rasio*, sehingga pemerintah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dari sisi pendapatan asli daerah, sekaligus mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi dan melihat keterkaitannya terhadap sektor-sektor dan sub-sub sektor ekonomi yang berpotensi menjadi penghela ekonomi wilayah.

5.7 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah

Tabel 8 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Gorontalo dominan ditopang oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Trend pertumbuhan sektor ini nampak sejak tahun 2009 mencapai Rp 128,444 juta atau sekitar 26,20% dari angka pertumbuhan sektor ini pada tahun sebelumnya. Selanjutnya diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi yang mencapai Rp 82,605 Juta atau sekitar 16,85%, Pada tahun 2010 sektor ini tetap mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp 90.554 Juta atau sekitar 17,17% dan terus mengalami kenaikan tahun 2011 yaitu Rp 97.707 juta. Sektor Jasa cukup memberikan kontribusi juga dimana pada tahun 2009 yaitu Rp 73.843 juta atau sekitar 15,06% dan kontribusi sektor ini terus meningkat tahun 2010 yaitu Rp 80, 515 Juta atau sekitar 15,26%, dan terus meningkat tahun 2011 yaitu Rp 89.019 juta atau sekitar 15,65%.

Sektor yang paling kecil kontribusinya terhadap poduk domestik regional bruto kota Gorontalo yaitu pertambangan, hal ini searah dengan potensi sumberdaya galian diwilayah ini relatif kecil meskipun penggunaannya sangat masif namun dijumpai seperti galian C lebih didominasi oleh galian C yang berasal dari daerah kabupaten disekitar seperti kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo.

Tabel 8 Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Gorontalo Tahun 2009-2011

Sektor	Tahun					
	2011		2010		2009	
	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%
Pertanian	31.749	5,58	30.161	5,72	29.165	5,95
Pertambangan	4.268	0,75	4.544	0,86	4.756	0,97
Industri Pengolahan	51.390	9,03	48.759	9,24	45.495	9,28
Listrik dan Air Bersih	11.895	2,09	11.543	2,19	11.085	2,26
Bangunan	65.538	11,52	58.777	11,14	52.676	10,75
Perdagangan, Hotel, Restoran	145.632	25,60	135.209	25,63	128.444	26,20
Angkutan/Komunikasi	97.707	17,18	90.554	17,17	82.605	16,85
Bank/Keu/Perum	71.669	12,60	67.453	12,79	62.134	12,68
Jasa	89.019	15,65	80.515	15,26	73.843	15,06
Total	568.868	100	527.514	100	490.203	100
Laju Pertumbuhan		8		8		-

Sumber: Biro Pusat Statistik Kota Gorontalo

5.8 Pemetaan Potensidan Implementasi Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah

Kecamatan Kota Tengah merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Utara, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, yang diresmikan pada tanggal 24 Maret 2005, melalui PERDA No 3 Tahun 2005, tentang pembentukan Kecamatan Kota Tengah. Dengan berlakunya PERDA tersebut maka diperlukan aturan pelaksanaan-nya yaitu keputusan Kepala Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Tengah. Terdapat empat kelurahan dikecamatan ini dan merupakan salah satu daerah pengembangan potensi usaha menengah kecil dan mikro UMKM didaerah kota Gorontalo.

Selanjutnya pada Tabel 9 dibawah ini menyajikan lebih detail tentang potensi usaha kecil menengah dan mikro dan bagaimana jenis-jenis UMKM tersebut dapat dikonfersi kedalam jenis usaha yang sejenis, juga bagaimana implementasi keterkaitan dan kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto kota Gorontalo. Hal ini penting agar manfaat ekonomi sektor UMKM dapat dilihat dengan nyata melalui pendekatan dan interpretasi serta analisis yang sederhana namun dapat menyampaikan data dan informasi yang lebih sistemik dan mudah dipahami. Selain itu data ini tersajikan disetiap kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan kota Tengah sehingga dapat diketahui bagaimana peran masing-masing kelurahan dalam mengembangkan sektor UMKM.

5.9 Pemetaan Potensi dan Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikro di Kelurahan Paguyaman.

Sektor UMKM di Kelurahan Paguyaman didominasi oleh usaha dagang terutama jenis usaha mikro berjumlah 78 unit. Implementasi UMKM masih didominasi oleh usaha perdagangan (diluar data Pasar Sentral dan PKL) maksudnya adalah diwilayah ini sedang berkembang usaha dagang berupa kios-kios dan usaha dagang ritel lainnya berjumlah 130 unit atau sekitar 62%, selanjutnya diikuti oleh industri pengolahan berjumlah 26 unit sekitar 12,3%, selanjutnya usaha akomodasi, makanan dan minuman yaitu 16 unit atau sekitar 7,6% , dikelurahan ini usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga memiliki kontribusi terhadap perekonomian juga yaitu 13 unit atau sekitar 6,2%, demikian pula usaha perantara keuangan cukup berkembang yaitu 10 unit atau 4,8%, sedangkan jenis usaha konstruksi berjumlah 8 unit atau sekitar 3,8%.Kemudian terdapat dua kelompok usaha yang memilki kontribusi pengembangan yang sama yaitu usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan penerengan lain dengan usaha transportasi dan pergudangan masing-masing berjumlah 3 unit atau sekitar 1,4%, dan kelompok usaha UMKM berkembang yaitu usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan berjumlah 1 unit atau sekitar 0,5%.

Dengan demikian pengembangan potensi UMKM dan implementasinya di kelurahan Paguyaman masih didominasi oleh kelompok usaha mikro berjumlah 78 unit dan diikuti oleh kecil 49 unit dan usaha menengah 3 unit. Kelompok usaha ini berpontesi untuk memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi terhadap masyarakat dan dapat garis bawahi bahwa kelompok usaha ini berkorelasi positif dengan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran di kota Gorontalo 2011.

Tabel 9 Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Paguyaman

No	SEKTOR	SEKTOR USAHA	JUMLAH USAHA			JML	Persentase (%)
			MENENGAH	KECIL	MIKRO		
1	Pertambangan & Penggalian	C =				0	-
2	Industri Pengolahan	D =	1	12	13	26	12,3
3	Listrik & Air	E =				0	-
4	Konstruksi	F =	1	7		8	3,8
5	Perdagangan (diluar data Pasar Sentral & PKL)	G =	3	49	78	130	62
6	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	H =		2	14	16	7,6
7	Transportasi dan Penggudangan	I =		3		3	1,4
8	Perantara Keuangan	J =	2	5	3	10	4,8
9	Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	K =		1		1	0,5
10	Administrasi Pmth & JamSos Wajib	L =				0	-
11	Jasa Pendidikan	M =				0	-
12	Jasa Kesehatan	N =				0	-
13	Jasa Kemasy,Sosbud,Hibrn & Penerangan lain	O =		2	1	3	1,4
14	Jasa perorangan yg melayani RT	P =	1	4	8	13	6,2
PDRB		Jml =	8	85	117	210	100

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo diolah Tim Peneliti 2014

5.9 Pemetaan Potensi dan Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikrodi Kelurahan Liluwo

Pengembangan kelompok UMKM di Kelurahan Liluwo didominasi oleh usaha dagang terutama jenis usaha mikro berjumlah 99 unit. Implementasi UMKM masih didominasi oleh usaha perdagangan (diluar data pasar sentral dan PKL) maksudnya adalah diwilayah ini sedang berkembang usaha dagang berupa kios-kios dan usaha dagang ritel lainnya berjumlah 146 unit atau sekitar 83,4%, selanjutnya diikuti oleh kelompok usaha konstruksi berjumlah 9 unit sekitar 5,1%, selanjutnya kelompok usaha perantara keuangan berjumlah 6 unit atau sekitar 3,4%, adapun jenis kelompok usaha ini dijumpai seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi lainnya yang telah memiliki badan hukum. Kelompok usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga memiliki kontribusi terhadap perekonomian juga yaitu 4 unit atau sekitar 2,9%, demikian pula kelompok usaha industri pengolahan cukup berkembang yaitu 5 unit atau 2,8%, sedangkan kelompok usaha penyediaan akomodasi dan makananminuman berjumlah 3 unit atau sekitar 1,7%. Kemudian terdapat dua kelompok usaha yang memiliki kontribusi pengembangan yang sama yaitu kelompok usaha perawatan dan jasa perusahaan dengan usaha transportasi dan pergudangan masing-masing berjumlah 1 unit atau sekitar 0,6%, dan terdapat 6 kelompok usaha UMKM belum berkembang seperti pertambangan dan penggalian, listrik dan Air.

Dengan demikian pengembangan potensi UMKM dan implementasinya di kelurahan Paguyaman masih didominasi oleh kelompok usaha mikro berjumlah 99 unit dan diikuti oleh kecil 44 unit dan usaha menengah 3 unit. Meskipun implementasi kelompok usaha berkembang memiliki kesamaan dengan Kelurahan Paguyaman namun dari aspek pengembangan kelompok usaha ini masih lebih unggul dari kapasitas dan jumlah usahanya. Oleh karena itu Kelompok usaha ini berpotensi untuk memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi terhadap masyarakat dan dapat digaris bawahi bahwa kelompok usaha ini berkorelasi positif dengan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran di kota Gorontalo 2011.

Implementasi pengembangan kelompok usaha kecil menengah dan mikro belum dapat berkembang karena pengusaha lebih tertarik mengembangkan jenis usaha yang dibutuhkan oleh pasar saat itu, meskipun jenis atau kelompok usaha tersebut bukan merupakan kelompok usaha yang sedang dikembangkan.

Tabel 10 Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Liluwo

No	SEKTOR	SEKTOR USAHA	JUMLAH USAHA			J M L	Persentase (%)
			MENENGAH	KECIL	MIKRO		
1	Pertambangan & Penggalian	C =				0	-
2	Industri Pengolahan	D =		4	1	5	2,8
3	Listrik & Air	E =				0	-
4	Konstruksi	F =	1	8		9	5,1
5	Perdagangan (diluar data Pasar Sentral & PKL)	G =	3	44	99	146	83,4
6	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	H =		1	2	3	1,7
7	Transportasi dan Penggudangan	I =		1		1	0,6
8	Perantara Keuangan	J =		2	4	6	3,4
9	Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	K =		1		1	0,6
10	Administrasi Pmth & JamSos Wajib	L =				0	-
11	Jasa Pendidikan	M =				0	-
12	Jasa Kesehatan	N =				0	-
13	Jasa Kemasy,Sosbud,Hibrn & Penerangan lain	O =				0	-
14	Jasa perorangan yg melayani RT	P =			4	4	2,9
		Jml =	4	61	110	175	100

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo diolah Tim Peneliti 2014

5.9.1 Pemetaan Potensi dan Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikro UMKM di Kelurahan Pulubala

Implementasi kelompok UMKM masih didominasi oleh usaha Perdagangan (diluar data Pasar Sentral dan PKL) maksudnya adalah diwilayah ini sedang berkembang usaha dagang berupa kios-kios dan usaha dagang ritel lainnya berjumlah 154 unit atau sekitar 76,2%. Hal ini sangat terkait dengan posisi wilayah kelurahan Pulubala yang didominasi oleh kompleks perumahan yang sudah cukup lama, sehingga masyarakat yang ada berdomisili dikawasan ini telah berkembang dan cukup maju.

Selanjutnya diikuti oleh kelompok usaha konstruksi berjumlah 20 unit sekitar 9,9%, kemudian kelompok usaha industri pengolahan berkembang juga dan berjumlah 8 unit atau sekitar 3,9%, adapun jenis kelompok usaha ini dijumpai seperti pengolahan Tahu dan Tempe karena penduduk dikomplek perumahan tersebut terdapat berbagai macam suku dan agama seperti Jawa yang lebih banyak mengkonsumsi jenis makanan ini. Kelompok usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga memiliki kontribusi terhadap perekonomian juga yaitu 6 unit atau sekitar 2,97%, kemudian terdapat dua kelompok usaha yang memiliki kontribusi pengembangan yang sama yaitu kelompok usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman dan Jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan penerangan lain masing-masing berjumlah 4 unit atau sekitar 2%. Disisi lain kelompok usaha perantara jasa keuangan berkembang juga berjumlah 3 unit atau sekitar 1,5% serta kelompok usaha transportasi dan pergudangan 1 unit atau sekitar 0,5%. Dan terdapat 5 kelompok usaha UMKM belum berkembang seperti pertambangan dan penggalian, listrik dan Air.

Dengan demikian pengembangan potensi UMKM dan implementasinya di kelurahan Pulubala masih didominasi oleh kelompok usaha mikro berjumlah 99 unit dan diikuti oleh kecil 49 unit dan usaha menengah 3 unit. Meskipun implementasi kelompok usaha berkembang memiliki kesamaan dengan Kelurahan Pulubala namun dari aspek pengembangan kelompok usaha ini masih lebih unggul dari kapasitas dan jumlah usahanya. Oleh karena itu Kelompok

usaha ini berpontesi untuk memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi terhadap masyarakat dan dapat garis bawahi bahwa kelompok usaha ini berkorelasi positif dengan kontribusi PDRB sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di kota Gorontalo 2011. Keterkaitan antara implementasi kelompok UMKM lebih maju dibanding dengan wilayah lain karena faktor lain yang mendukung yaitu karena kawasan ini merupakan daerah pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk cukup banyak adanya kawasan perumahan.

Tabel11 Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Pulubala

No	SEKTOR	SEKTOR USAHA	J U M L A H U S A H A			JML	Per sentasi (%)
			MENENGAH	KECIL	MIKRO		
1	Pertambangan & Penggalian	C =				0	-
2	Industri Pengolahan	D =		7	1	8	3,9
3	Listrik & Air	E =				0	-
4	Konstruksi	F =	2	18		20	9,9
5	Perdagangan (diluar data Pasar Sentral & PKL)	G =	6	49	99	154	76,2
6	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	H =		3	1	4	2
7	Transportasi dan Penggudangan	I =		1		1	0,5
8	Perantara Keuangan	J =		2	1	3	1,5
9	Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	K =		2		2	0,9
10	Administrasi Pmth & JamSos Wajib	L =				0	-
11	Jasa Pendidikan	M =				0	-
12	Jasa Kesehatan	N =				0	-
13	Jasa Kemasy,Sosbud,Hibrn & Penerangan lain	O =		3	1	4	2
14	Jasa perorangan yg melayani RT	P =		4	2	6	2,97
		Jml =	8	89	105	202	100

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo di olah Tim Peneliti 2014

5.9.2 Pemetaan Potensi dan Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikro UMKM di Kelurahan Wumiyalo

Perkembangan kelompok UMKM di Kelurahan Wumiyalomasih seperti kelompok usaha yang berkembang diwilayah atau kelurahan lain, dimana kelompok UMKM mendominasi yaitu usaha perdagangan diluar data Pasar sentral dan PKL terutama jenis usaha mikro berjumlah 99 unit, diikuti oleh kelompok usaha Kecil berjumlah 66 unit dan kelompok usaha menengah berjumlah 5 unit. Data menunjukkan bahwa implementasi kelompok UMKM masih didominasi oleh usaha perdagangan (diluar data pasar sentral dan PKL) maksudnya adalah diwilayah ini sedang berkembang usaha dagang berupa kios-kios dan usaha dagang ritel lainnya berjumlah 170 unit atau sekitar 67,2%. Hal ini sangat terkait dengan posisi wilayah ini yang didominasi oleh kompleks perumahan dan pemukiman yang sudah cukup padat, sehingga peluang untuk membuka usaha dagang terutama kebutuhan sembilan bahan pokok, cukup terbuka peluang karena adanya potensi permintaan yang banyak.

Selanjutnya diikuti oleh kelompok usaha industri pengolahan berjumlah 19 unit sekitar 7,5%, dan diikuti oleh kelompok usaha konstruksi berjumlah 17 unit atau sekitar 6,7% kemudian terdapat dua kelompok usaha yang memiliki kontribusi pengembangan yang sama yaitu kelompok usaha penyediaan akomodasi makanan dan perantara Keuangan masing-masing berjumlah 14 unit atau masing-masing sekitar 5,5%.

Dijumpai pula 3 jenis kelompok UMKM memiliki perkembangan sama yaitu usaha transportasi dan pergudangan 2 unit atau 0,8% jasa kesehatan 2 unit atau 0,8% dan usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan penerangan lain 4 unit atau 0,8%. Demikian pula untuk kelompok UMKM jasa perawatan dan jasa perusahaan, juga jasa pendidikan sama perkembangannya yaitu masing-masing 1 unit atau sekitar 0,4%. dan terdapat 2 kelompok usaha UMKM belum berkembang seperti pertambangan dan penggalian, listrik dan air serta kelompok UMKM administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib.

Dengan demikian pengembangan potensi UMKM dan implementasinya di kelurahan Wumiyalo masih didominasi oleh kelompok UMKM perdagangan dan dapat diasumsikan bahwa manfaat ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha ini dapat berkolerasi dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto kota Gorontalo 2011.

Tabel 12 Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Wumiyalo

No	SEKTOR	SEKTOR USAHA	JUMLAH USAHA			JML	Persentase
			MENENGAH	KECIL	MIKRO		
1	Pertambangan & Penggalian	C =				0	-
2	Industri Pengolahan	D =		11	8	19	7,5
3	Listrik & Air	E =				0	-
4	Konstruksi	F =	1	12	4	17	6,7
5	Perdagangan (diluar data Pasar Sentral & PKL)	G =	5	66	99	170	67,2
6	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	H =		3	11	14	5,5
7	Transportasi dan Penggudangan	I =	1		1	2	0,8
8	Perantara Keuangan	J =	2	5	7	14	5,5
9	Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	K =		1		1	0,4
10	Administrasi Pmth & JamSos Wajib	L =				0	-
11	Jasa Pendidikan	M =			1	1	0,4
12	Jasa Kesehatan	N =	1	1		2	0,8
13	Jasa Kemasy,Sosbud,Hibrn & Penerangan lain	O =		1	1	2	0,8
14	Jasa perorangan yg melayani RT	P =		2	9	11	4,3
		Jml =	10	102	141	253	100

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo diolah Tim Peneleti 2014

5.9.3 Pemetaan Potensi dan Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikro UMKM di Kelurahan Dulalowo Timur

Kelurahan Dulalowo Timur adalah pemekaran dari Kelurahan Induk Dulalowo dimana Perkembangan kelompok UMKM diwilayah ini relatif masih kecil dan juga kelompok usaha yang berkembang diwilayah ini relatif sama dengan UMKM di kelurahan lain, dimana kelompok UMKM mendominasi yaitu usaha perdagangan diluar data Pasar sentral dan PKL terutama jenis usaha mikro berjumlah 73 unit atau sekitar 84%, rinciannya yaitu kelompok usaha kecil berjumlah 63 unit dan kelompok usaha menengah belum berkembang.

Dari data yang ada, diketahui bahwa implementasi diwilayah ini sedang berkembang usaha dagang berupa kios-kios dan usaha dagang ritel lainnya hal ini sangat terkait dengan posisi wilayah ini yang didominasi oleh kompleks pemukiman penduduk asli dan masih terbatasnya wilayah pemukiman, selain itu sebagian lahan yang ada masih dimanfaatkan untuk pertanian karena didukung oleh ketersediaan pengairan dari irigasi teknis, sehingga peluang untuk membuka usaha dagang terutama kebutuhan sembilan bahan pokok relatif kecil, namun peluang UMKM terutama pada jasa kelompok usaha makan dan restoran cukup terbuka karena diwilayah ini berkembang penginapan atau asrama mahasiswa.

Selanjutnya diikuti oleh kelompok usaha Industri Pengolahan berjumlah 6 unit sekitar 6,9%, dan usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan berjumlah 5 unit atau sekitar 5,8%. Dijumpai pula 3 jenis kelompok UMKM memiliki perkembangan sama yaitu usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman 1 unit atau sekitar 1,1%, usaha konstruksi 1 unit atau 1,1% dan usaha jasa perorangan melayani rumah tangga 1 unit atau 1,1%. Terdapat 7 kelompok UMKM yang belum terimplementasi diwilayah ini karena konsentarsi UMKM berkembang diwilayah kelurahan induk dan dijumpai juga terdapat beberapakeompok usaha yang belum terdata dengan baik, karena potensi pengembangan UMKM cukup dinamis, karena semakin banyaknya pemukiman-pemukiman berupa kawasan perumahan yang dibangun diwilayah ini. Namun demikian bahwa kontribusi kelompok usaha kecil menengah dan mikro terhadap

produk domestik regional bruto Kota Gorontalo telah ada meskipun masih relatif kecil bila dibanding dengan kontribusi kelurahan lain di Kecamatan kota Tengah.

Tabel 13 Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Dulalowo Timur

No	SEKTOR	SEKTOR USAHA	JUMLAH USAHA			JML	Persen tase %
			MENENGAH	KECIL	MIKRO		
1	Pertambangan & Peggalian	C =				0	-
2	Industri Pengolahan	D =		1	5	6	6,9
3	Listrik & Air	E =				0	-
4	Konstruksi	F =		1		1	1,1
5	Perdagangan (diluar data Pasar Sentral & PKL)	G =		10	63	73	84
6	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	H =		1		1	1,1
7	Transportasi dan Penggudangan	I =				0	-
8	Perantara Keuangan	J =				0	-
9	Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	K =				0	-
10	Administrasi Pmth & JamSos Wajib	L =				0	-
11	Jasa Pendidikan	M =				0	-
12	Jasa Kesehatan	N =				0	-
13	Jasa Kemasy,Sosbud,Hi brn & Penerangan lain	O =		4	1	5	5,8
14	Jasa perorangan yg melayani RT	P =		1		1	1,1
		Jml =	0	18	69	87	100

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo di olah Tim Peneliti 2014

5.9.4 Pemetaan Potensi dan Implementasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikro UMKM di Kelurahan Dulalowo

Kelurahan Dulalowo adalah wilayah yang berhimpitan langsung dengan kampus Universitas Negeri Gorontalo yang notabene transaksi ekonomi mahasiswa dan masyarakat sekitar menjadi daya tarik bagi pengembangan UMKM. Perkembangan kelompok UMKM di wilayah ini relatif sudah berkembang karena adanya keterkaitan antara simpul kegiatan mahasiswa dan masyarakat sekitar terhadap permintaan akan berbagai macam kebutuhan.

Kelompok UMKM mendominasi yaitu usaha perdagangan diluar data Pasar sentral dan PKL terutama jenis usaha mikro berjumlah 200 unit kemudian usaha kecil berjumlah 89 unit dan usaha menengah 5 unit sehingga total kelompok usaha ini yaitu 294 unit atau 79,2%. Dijumpai bahwa implementasi UMKM di wilayah ini sedang berkembang pesat terutama usaha dagang berupa kios-kios dan usaha dagang lainnya seperti outlet-outlet makanan jadi dan usaha jasa foto copy dan penjiilidan yang cukup dibutuhkan oleh mahasiswa. Meskipun lahan di wilayah ini di dominasi oleh kompleks pemukiman penduduk asli dan sebagian lahan masih dimanfaatkan untuk pertanian karena didukung oleh ketersediaan pengairan dari irigasi teknis namun aktivitas ekonomi sudah cukup berkembang, sehingga peluang untuk membuka usaha dagang terutama kebutuhan sembilan bahan pokok, relatif kecil namun peluang UMKM terutama pada jasa kelompok usaha makan dan restoran cukup terbuka karena di wilayah ini berkembang penginapan atau asrama mahasiswa.

Selanjutnya implementasi kelompok usaha perantara keuangan berada pada peringkat kedua dengan jumlah 21 unit atau 5,7%, dan diikuti oleh kelompok usaha Konstruksi berjumlah 18 unit atau 4,9%. Kemudian kelompok usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman berjumlah 15 unit atau 4,0%, Demikian pula kelompok usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga cukup berkembang yaitu 12 unit atau 3,2%, dan kelompok usaha Jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan dan penerangan lain menempati urutan kelima dengan jumlah 6 unit atau 1,6%, dan kelompok usaha Industri pengolahan menempati urutan ke tujuh dengan jumlah 5 unit atau 1,3%. Dijumpai pula terdapat 7 jenis kelompok UMKM yang belum berkembang, namun pada umumnya UMKM ini tidak memiliki sumberdaya yang dapat dikelola dan

dikembangkan seperti kelompok pertambangan dan penggalian, kelompok usaha listrik dan air.

Tabel 14 Implementasi Kelompok UMKM di Kelurahan Dulalowo

No	SEKTOR	SEKTOR USAHA	JUMLAH USAHA			JML	Persentase (%)
			MENENGAH	KECIL	MIKRO		
1	Pertambangan & Penggalian	C =				0	-
2	Industri Pengolahan	D =		3	2	5	1,3
3	Listrik & Air	E =				0	-
4	Konstruksi	F =	1	17		18	4,9
5	Perdagangan (diluar data Pasar Sentral & PKL)	G =	5	89	200	294	79,2
6	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	H =		5	10	15	4,0
7	Transportasi dan Penggudangan	I =				0	-
8	Perantara Keuangan	J =	4	7	10	21	5,7
9	Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	K =				0	-
10	Administrasi Pmth & JamSos Wajib	L =				0	-
11	Jasa Pendidikan	M =				0	-
12	Jasa Kesehatan	N =				0	-
13	Jasa Kemasy,Sosbud,Hibrn & Penerangan lain	O =		6		6	1,6
14	Jasa perorangan yg melayani RT	P =		10	2	12	3,2
		Jml =	10	137	224	371	100

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo di olah Tim Peneliti 2014

5.9.5 Kapasitas Aset Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) di Kecamatan Kota Tengah.

Faktor utama pada implementasi dan pengembangan potensi UMKM yaitu

- 1) Berapa besar kapasitas aset usaha yang dimiliki, hal ini menjadi penentu manajemen untuk menggerakkan lokomotif usaha sekaligus dapat membangun kepercayaan diri setiap manajemen usaha untuk mencapai target kerja,
- 2) Berapa

banyak kapasitas tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk menggerakkan sumberdaya aset dalam menjalankan bisnis, aspek menjadi indikator utama karena faktor manusialah yang menjadi penentu hidup dan matinya setiap UMKM. Ketersediaan dua faktor ini menjadi indikator penting layak dan tidak layaknya jenis usaha ini dapat dikembangkan dan juga menjadi stimulus bagi investor termasuk bank untuk mau menginvestasikan uang atau mengucurkan pinjamannya pada usaha tersebut selain itu pemerintah telah menempatkan dua hal ini untuk memeberikan bantuan pada pengembangan UMKM.

Terkait dengan hal tersebut dapat disimak bagaimana kapasitas UMKM di masing-masing kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Kota Tengah. 1) Kelurahan Paguyaman memiliki memiliki potensi usaha kecil menengah dan mikro sekitar 210 jenis usaha dengan total tenaga kerja yang dimanfaatkan yaitu 155 orang dengan total aset yaitu Rp 31.433.438.624 2) Selanjutnya Kelurahan Dulalowo terdapat 371 jenis usaha kecil menengah dan mikro dengan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 219 orang dengan total aset yang dimiliki yaitu Rp 60.475.494.608, 3) Kemudian Kelurahan Pulubala terdapat 202 jenis UMKM dengan total aset yaitu Rp 13.631.241.842 dan mampu menyerap tenaga kerja 132 orang, 4) Demikian pula Kelurahan Liluwo terdapat 253 jenis UMKM berpotensi untuk dikembangkan dengan kapasitas aset yang dimiliki yaitu Rp 13.386.259.333 5) Terdapat pula Kelurahan pemekaran yaitu Dulalowo Timur dengan jumlah UMKM 98 jenis dengan kapasitas aset yaitu Rp 704.405.000 dan mampu menyerap tenaga kerja yaitu 10 orang, 6) di Kelurahan Wumiyalo terdapat 175 jenis UMKM dengan total aset yaitu Rp 15.114.716.413 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 269 orang.

Tabel 15 menunjukkan bahwa total aset untuk jenis usaha kecil di Kecamatan Kota Tengah yaitu Rp. 52.036.836.792, kemudian total aset untuk jenis usaha menengah yaitu Rp 75.125.517.268, sedangkan untuk jenis usaha mikro yaitu Rp 7.583.201.760. Selanjutnya dapat diilustrasikan juga kapasitas aset untuk masing-masing kelurahan di Kecamatan kota Tengah yaitu kapasitas aset UMKM di kelurahan Paguyaman yaitu Rp 31.433.438.624 dan Kapasitas aset di kelurahan Dulalowo yaitu Rp 60.475.494.608, selanjutnya untuk kapasitas aset di

Kelurahan Dulalowo Timur yaitu Rp 704.405.000, kemudian kapasitas aset di Kelurahan Liluwo yaitu Rp 13.386.259.333, demikian pula kapasitas aset usaha di Kelurahan Pulubala yaitu Rp 13.631.241.842 dan Kapasitas aset usaha kecil menengah dan mikro di Kelurahan Wumiyalo yaitu Rp 15.114.716.413. Tenaga kerja yang dimanfaatkan di masing-masing UMKM tidak hanya mempekerjakan laki-laki namun terdapat pula para pekerja wanita.

Tabel 15 Implementasi Kapasitas Aset Usaha Kecil Menengah dan Mikro di Kecamatan Kota Tengah 2014.

No	Nama Kelurahan	Kapasitas Aset UMKM di Kecamatan Kota Tengah			
		Usaha Kecil (Rp)	Usaha Menengah (Rp)	Usaha Mikro (Rp)	Total Aset/ Kelurahan (Rp)
1	Paguyaman	22.511.442.23 4	8.110.998.195	810.998.195	31.433.438.624
2	Dulalowo	9.236.010.803	47.261.126.85 9	3.978.356.94 6	60.475.494.608
3	Dulalowo Timur	674.000.000	-	30.405.000	704.405.000
4	Liluwo	4.808.248.721	7.660.000.000	918.010.612	13.386.259.333
5	Pulubala	6.640.239.542	6.111.000.000	880.002.300	13.631.241.842
6	Wumiyalo	8.166.895.492	5.982.392.214	965.428.707	15.114.716.413
	Total Aset	52.036.836.79 2	75.125.517.26 8	7.583.201.76 0	134.745.555.820

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo diolah Tim Peneliti 2014

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan rekomendasi dapat dilustrasikan pada penelitian ini yaitu:

5.1. Kesimpulan:

- A. Implementasi pengembangan UMKM dari aspek Kapasitas aset yaitu terbesar di Kelurahan Dulalowo, selanjutnya Kelurahan Paguyaman berada pada urutan kedua dan kemudian diikuti oleh Kelurahan Wumiyalo dan Kelurahan Pulubala dan Liluwo, Setelah itu Kelurahan Dulalowo Timur berada pada peringkat terakhir karena merupakan wilayah pemekaran dari kelurahan induk.
- B. Kemudian Implementasi pada kapasitas penyerapan tenaga kerja yaitu jenis UMKM di Kelurahan Wumiyalo yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, selanjutnya diikuti oleh Kelurahan Liluwo, Kemudian Kelurahan Pulubala dan Dulalowo serta terakhir yaitu kelurahan Dulalowo Timur.

5.2 Saran :

- A. Kapasitas aset UMKM di Kecamatan Kota Tengah perlu dikonversi menjadi modal usaha agar mampu meningkatkan kapasitas dan kelayakan serta kepastian usaha kemas yang akan datang melalui peran pemerintah dan perbankan serta otoritas jasa keuangan.
- B. Peningkatan kapasitas tenaga terlatih dan terdidik perlu terus ditingkatkan melalui model pelatihan dan pemagangan dengan peran pemerintah terutamadinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo dengan tanpa mengabaikan kapasitas anggaran yang dimiliki sehingga lebih mampu mendorong dan menciptakan tenaga kerja yang bukan pencari pekerjaan tetapi mampu menciptakan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Affendi Anwar.2008 Ekonomi Kelembagaan Baru dan Biaya Transaksi. Essay PWD. SPS IPB Bogor

Anonim, 2008 **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jakarta

----- .2012 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2012. Provinsi Gorontalo

----- .2013 Kota Gorontalo Dalam Angka 2013. Kota Gorontalo

----- .2013 Rekapitan Pelaku Ekonomi Mikro se- Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

BAPPENAS.2004 Perencanaan Pengembangan Kawasan untuk Percepatan Pembangunan Daerah, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, BAPPENAS Jakarta

Buku Profile UMKM. 2009. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Suyono, Suyono. 2009 Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga, Balai Pustaka Jakarta

Suyono, Haryono. 2012 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Affendi Anwar.2008 Ekonomi Kelembagaan Baru dan Biaya Transaksi. Essay PWD. SPS IPB Bogor

Anonim, 2008 **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jakarta

----- .2012 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2012. Provinsi Gorontalo

----- .2013 Kota Gorontalo Dalam Angka 2013. Kota Gorontalo

----- .2013 Rekapitulasi Pelaku Ekonomi Mikro se- Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

BAPPENAS.2004 Perencanaan Pengembangan Kawasan untuk Percepatan Pembangunan Daerah, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, BAPPENAS Jakarta

Buku Profile UMKM. 2009. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Suyono, Suyono. 2009 Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga, Balai Pustaka Jakarta

Suyono, Haryono. 2012 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Jakarta

LAMPIRAN

I. Biodata Ketua Tim Peneliti

Nama Lengkap : Hj. Irawati Abdul, SE., M.Si

Alamat Lengkap : Perum Kaputih Indah, Blok F no. 9 Kec. Kota
Tengah Kota Gorontalo

Nomor Telp : 085240105510

Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi	Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi
1999	Sarjana	Unsrat Manado	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Permintaan Jasa Telepon Di Kota Madya Manado
2009	Magister	Unsrat Manado	Ilmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah	Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Pentadio Resort Di Kabupaten Gorontalo

Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
2013	Survey Sosial Ekonomi dalam rangka Pengembangan demplot Kelapa Kopyor berbasis Perkebunan Rakyat dilokasi Pengembangan Wisata Provinsi Gorontalo	Anggota	Hibah Pemprov
2011	Pengaruh Komponen Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi	Anggota	PNBP
2010	Kajian Pengembangan kapasitas pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di kota Gorontalo	Anggota	Im-Here
2010	Strategi kawasan wisata di kabupaten gorontalo (studi kasus di kawasan wisata pentadio resort)	Ketua	Im-Here
2010	Pengaruh factor-faktor Kompetensi terhadap peningkatan kinerja pada PT BNI perseso tbk. Makassar	Anggota	Im-Here

Publikasi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2014	Pengaruh factor Sarana prasarana terhadap pendapatan masyarakat Nelayan (studi kasus di olele Kabupaten Bone Bolango	Jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan vol.1 no 3
2014	Strategi pengembangan Parawisata	ISBN:978-602-1396-05-6
2009	Peningkatan SDM merupakan kunci keberhasilan suatu instansi /lembaga di era globalisasi dan otonomi daerah	Jurnal kebijakan Publik
2009	Penerapan Good Governance dalam pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Povinsi Gorontalo	Jurnal kebijakan Publik
2008	Dampak informasi Asimetris terhadap budgetary slack pada sector public dengan komitmen organisasi sebagai penghubung.	Jurnal teknologi dan manajemen informasi: terakridasi SK Dirjen Dikti No 55/dikti/kep2005
2007	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual dalam rangka dalam rangka pengembangan usaha	Jurnal matematika, IPA, Ilmu Sosial, Teknologi dan terapan (INOVASI)
2007	Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam rangka perbaikan lingkungan pemukiman kumuh	Jurnal Ilmu Sosial – ISSN: 1693-0932

II. Biodata Tim Peneliti

Nama Lengkap : Melizubaida Mahmud, S.Pd.,M.Si

Alamat Lengkap : Desa Boludawa Kec. Suwawa

Kab. Bone Bolango

Nomor Telp : 085298482935

Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi	Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi
2001	Sarjana	STKIP Gorontalo	Pendidikan Ekonomi/Perkantoran	Pengaruh Lingkungan Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa
2011	Magister	Universitas Sam Ratulangi Manado	Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan/Manajemen Administrasi Publik	Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Gorontalo

Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
2012	Studi Penelusuran Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota Tim	I-Mhere. Rp. 30 Jt.
2013	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango	Ketua Tim	PNBP Rp. 5 Jt
2013	Survey Sosial Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Demplot Kelapa Kopyor Berbasis Perkebunan Rakyat di Lokasi Pengembangan Wisata Pantai di Provinsi Gorontalo	Anggota	Hibah Pemprov Rp.300 Jt.

Publikasi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2009	Pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada BKKPD	PK2P/Kebijakan

	kabupaten Pohnuato	Publik
2010	Pentingnya Manajemen Sistem Penyimpanan Arsip	PK2P/Kebijakan Publik
2013	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kec. Bone Kab. Bonbol	Oikos Nomos
2013	Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Gorontalo	PK2P/Kebijakan Publik

III. Biodata Tim Peneliti

Nama Lengkap : Fitri Hadi Yulia Akib, SE.,ME

Alamat Lengkap : Jl. Sawah Besar Kelurahan Heledulaa Utara Kec.

Kota Timur Kota Gorontalo

Nomor Telp : 085256083443

Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi	Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi
2007	Sarjana	Unsrat Manado	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Kontribusi Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo
2010	Magister	Unrat Manado	Ilmu Ekonomi Pembangunan	Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo

Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
2013	Kaji Ulang Program Agropolitan Jagung Provinsi Gorontalo	Anggota	Hibah Kompetensi
2012	Dampak Perbedaan Siklus RPJMD dan RPJMN Pada Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo	Anggota	BOPTN
2012	Kinerja Pelayanan Akademik Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG	Anggota	I-Mhere
2011	Pengaruh Komponen Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo.	Ketua	PNBP FEB

Publikasi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2010	Analisis Kinerja Makro Ekonomi Provinsi	Lembaga Pengkajian,

	Gorontalo	Penelitian Ekonomi dan Bisnis FEB/ jurnal kajian ekonomi dan bisnis Oikos-Nomos
2014	Analisis Fokus dan Relevansi Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo dengan Nasional	Lembaga Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis FEB/ jurnal kajian ekonomi dan bisnis Oikos-Nomos